



# Buletin Parlementaria



3 Ekosistem Pendidikan Sehat, Ciptakan SDM Unggul



5 Abdul Kharis: Pers Garda Depan Sampaikan Kebenaran



Ajarkan *Smart Farming* kepada Petani Muda



Miris! Jumlah Pejudi *Online* Indonesia Tertinggi di Dunia

Nomor 1291/1/V/2024 Mei 2024



9 772614 339005



## Tingkatkan Sarpras Balai Rehabilitasi Sosial





# Tingkatkan Sarpras Balai Rehabilitasi Sosial

**W**akil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengapresiasi keberadaan balai rehabilitasi sosial yang secara khusus menangani disabilitas netra, yaitu Sentra Mahatmiya Tabanan Bali. Ia menekankan agar sarana dan prasarana (sarpras) balai ini ditingkatkan, termasuk adanya galeri, hingga bentuk-bentuk pelatihan lainnya agar sentra ini dapat terus berkarya.

"Galeri itu menyangkut termasuk tempat wisata, perlu untuk dipublikasikan. Bahwa hasil dari (karya) anak-anak, orang-orang yang disabilitas mendapatkan hasil produk-produk yang sangat bagus. Tadi ada limbah koran (yang diubah) jadi tempat yang bagus," tuturnya kepada **Parlementaria**, di Tabanan, Bali, Kamis (2/5/2024).

Menurutnya, secara keseluruhan gebrakan program Kementerian Sosial yang ada di Sentra Mahatmiya Tabanan Bali ini merupakan ide luar biasa. Semula, ia hanya mengira bahwa sentra ini hanya tempat bagi para kaum disabilitas, tapi



Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Tabanan, Bali, Kamis (2/5/2024).

ternyata hal ini sudah ditingkatkan dan bahkan ada pelatihan-pelatihan keahlian dan keterampilan lainnya.

"Dulu saya kira ini hanya untuk orang-orang yang disabilitas, tapi ini sudah ditingkatkan. Ada juga pelatihan, ada juga sudah membuat Sarpras ini sudah bagus. Saya akan lebih mendorong Ibu Menteri Sosial (agar) nanti kalau bisa ini

anggaran dari Kemensos ini untuk ditingkatkan kembali, karena Beliau selalu mengatakan ini kurang," jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Selain itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menilai apa yang dilakukan Sentra Mahatmiya Tabanan Bali adalah suatu upaya atensi yang dilakukan Kementerian Sosial yang multifungsi. Oleh karena, menurutnya, banyak klaster yang ditangani oleh sentra ini.

"Tentu harus ada terobosan dari Kemensos sampai mereka mandiri. Bukan dilakukan oleh Kemensos saja tetapi juga harus dilakukan oleh Kemenkes, Kemendikbud kemudian Kemenkop-UKM agar mereka mendapatkan sentuhan-sentuhan dan merasakan bahwa negara hadir di tengah-tengah mereka," tandas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

ndy/rdn



Scan QR untuk berita selengkapnya

# Ekosistem Pendidikan Sehat, Ciptakan SDM Unggul



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani.

FOTO:OPI/PDT

**K**etua DPR RI Puan Maharani berbicara mengenai pentingnya ekosistem pendidikan yang berpengaruh terhadap terciptanya sumber daya manusia (unggul). Mulai dari pemerataan kualitas pendidikan di Tanah Air hingga hak anak memperoleh sekolah yang aman dalam menempuh pendidikan.

“Pada momen Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei, saya mengajak semua stakeholder dan masyarakat untuk merefleksikan mengenai kualitas pendidikan di Indonesia saat ini,” kata Puan saat berkomentar memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024, Kamis (2/5).

Ia pun berharap agar peringatan Hari Pendidikan Nasional tidak dijadikan hanya sebagai seremoni semata. Puan mengingatkan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan negara sehingga setiap unsur dari pendidikan perlu terus mendapat perhatian.

Pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia sendiri masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup kompleks. Oleh karenanya, Pemerintah diingatkan untuk terus mengevaluasi kinerja pelayanan pendidikan demi memastikan semua anak memperoleh kesetaraan dalam mendapatkan pendidikan yang layak. **aha**



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**WAKIL PENGARAH**  
Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

**PIMPINAN PELAKSANA**  
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**  
M. Ibnurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

**WAKIL PIMPINAN REDAKSI**  
Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)  
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)  
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

**REDAKTUR**  
Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

**REDAKTUR FOTO**  
M. Andri Nurdiansyah

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,  
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

**ANGGOTA REDAKSI**  
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom,  
Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos.,  
Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom.,  
Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setiantio, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

**FOTOGRAFER**  
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budluti, Arief Rachman,  
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Alfdhillah, Geraldi Opie,  
Hasri Mentari, Friederick Munchen

**ANALIS MEDIA**  
Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P,  
Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha,  
Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita,  
Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska

**INFOGRAFIS**  
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

**ADMINISTRASI**  
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

**PENERBITAN**

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

**IT MEDIA DIGITAL**  
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Zulfikar, S.A.B.

**ADMINISTRASI**

**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrinsa Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK  
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



# Ajarkan *Smart Farming* kepada Petani Muda

**W**akil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode *smart farming* di negaranya.

"Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta *smart farming* kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja," kata Gobel saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, *Liberal Democratic Party* (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5).

Perubahan iklim dengan cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti serta konflik geopolitik yang terjadi saat ini berdampak pada hasil pertanian dan kenaikan harga pupuk yang tinggi. Hal tersebut membuat Indonesia melakukan impor beras untuk



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, *Liberal Democratic Party* (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

"Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah

yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina," jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Jepang dikenal memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Produk pertanian Jepang juga memiliki cita rasa yang lezat dan harga yang bagus.

Oleh karena itu, ia meminta Jepang untuk mengajarkan pembuatan pupuk organik dan *smart farming*. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas. Karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.

azk/rdn





# Abdul Kharis: Pers Garda Depan Sampaikan Kebenaran

**W**akil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai pers berperan penting dalam memajukan akses dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Hal itu ia sampaikan dalam Hari Kebebasan Pers Sedunia yang kerap diperingati pada 3 Mei.

“Dengan tekad yang teguh, Pers telah menjadi pionir dalam memastikan bahwa masyarakat kita tidak hanya terinformasikan tentang apa yang terjadi di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri,” ungkap Abdul Kharis dalam keterangan tertulis yang diterima **Parlementaria**, di Jakarta, Sabtu (4/5).

Pers juga, imbuhnya, telah menetapkan standar baru dalam melaporkan berita dengan keberanian dan integritasnya. Hal itu tercermin dari dedikasi para insan pers untuk mengabarkan kepada dunia dalam wilayah konflik yang muncul di Gaza dan belahan bumi lainnya



FOTO: RSB/PDT

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.

yang tengah konflik. Menurutnya, konflik tersebut menjadi sangat berbahaya bagi jurnalis secara global. Selain itu perang Israel di

Gaza menjadi konflik paling memantik bagi jurnalis.

“Mari kita menghargai peran penting Pers dalam memastikan bahwa kebenaran, yang tidak hanya menjadi hak, tetapi juga menjadi warisan yang kita sampaikan kepada generasi mendatang. Sehingga hari Kebebasan Pers Sedunia sebagai monumental nilai kebenaran dan melindungi orang-orang yang bekerja dengan berani untuk mengungkapkannya,” jelas Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah ini.

Melalui kerja kerasnya, Politisi Fraksi PKS itu menambahkan, Pers telah menciptakan terobosan yang menginspirasi, menjembatani kesenjangan informasi, dan memperluas batas-batas pemahaman tentang dunia yang ada di sekitar kita. **hal/rdn**



**DENGAN TEKAD YANG TEGUH, PERS TELAH MENJADI PIONIR DALAM MEMASTIKAN BAHWA MASYARAKAT KITA TIDAK HANYA TERINFORMASIKAN TENTANG APA YANG TERJADI DI DALAM NEGERI, TETAPI JUGA DI LUAR NEGERI.**

**Abdul Kharis Almasyhari**

Wakil Ketua Komisi I DPR RI



Scan QR untuk berita selengkapnya





# Penyelenggara Pilkada Harus Giat Sosialisasi

**P**artisipasi pemilih pada Pemilu tahun 2024 di Provinsi Riau mengalami penurunan. Dimana pada Pemilu tahun 2019 lalu, partisipasi pemilih di Riau mencapai 78 persen, sedangkan pada pemilu tahun 2024 partisipasi pemilih turun menjadi 77 persen.

Hal inilah juga yang menjadi sorotan Anggota Komisi II DPR RI Arsyadjuliandi Rachman, yang mendorong penyelenggara pemilu dan *stakeholder* terkait. Ia mendorong agar pihak-pihak tersebut lebih gencar lagi melakukan sosialisasi, terlebih dalam waktu dekat akan ada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak.

"Jadi saya rasa untuk ke depan tentu kita harus mendorong lagi untuk partisipasi ini lebih meningkat lagi dari yang sebelum-sebelumnya termasuk dari yang sekarang. Dan nanti kita akan buktikan lagi di pemilu keadaan serentak," kata kata Arsyad saat ditemui usai Kunjungan



Anggota Komisi II DPR RI Arsyadjuliandi Rachman dalam foto bersama usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses, di Pekanbaru, Riau, Selasa (23/4/2024).

Kerja Reses, di Pekanbaru, Riau, Selasa (23/4).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, para penyelenggara

pemilu harus giat menjelaskan pentingnya memilih kepala daerah yang berkualitas untuk daerah yang bersangkutan. Meski demikian, Arsyad menilai proses tahapan pemilukada di Provinsi Riau sudah berjalan cukup baik.

Dalam kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur Riau SF Hariyanto menjelaskan, penurunan jumlah pemilih pada pemilu 2024, dikarenakan hujan yang turun hampir di semua daerah di Provinsi Riau dan bencana banjir yang mengakibatkan pemilih tidak ingin datang ke TPS. SF Hariyanto juga menyampaikan, untuk mensukseskan Pemilu serentak 2024, Pemprov Riau memberikan hibah dana kepada KPU sebesar Rp 133 miliar, kemudian Bawaslu Rp31 miliar dan Rp29 miliar untuk keamanan. **we/aha**



**JADI SAYA RASA UNTUK KE DEPAN TENTU KITA HARUS MENDORONG LAGI UNTUK PARTISIPASI INI LEBIH MENINGKAT LAGI DARI YANG SEBELUM-SEBELUMNYA TERMASUK DARI YANG SEKARANG. DAN NANTI KITA AKAN BUKTIKAN LAGI DI PEMILU KEADAAN SERENTAK.**

**Arsyadjuliandi Rachman**

Anggota Komisi II DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnyanya





# Persiapan Keamanan Jelang Forum Air Sedunia

**T**im Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI melakukan pengecekan persiapan keamanan menjelang perhelatan Forum Air Sedunia (*World Water Forum*) ke-10 di Bali, pada 18-25 Mei 2024 mendatang. Pengecekan tersebut untuk memastikan keamanan dan kenyamanan semua peserta selama acara.

Diketahui, DPR RI ditunjuk sebagai tuan rumah dari 'Parliamentary Meeting on The Occasion of the 10<sup>th</sup> World Water Forum'. Acara yang bertema 'Air untuk Kemakmuran Bersama' ini akan berlangsung di Nusa Dua, Bali. Adapun khusus selama empat hari untuk pertemuan parlemen, mulai dari tanggal 19 hingga 22 Mei 2024.

Diperkirakan acara ini akan dihadiri oleh perwakilan dari 42 negara, yang menjadikannya sebagai forum internasional yang signifikan dalam upaya menjaga dan melestarikan sumber daya air dunia.

Anggota Komisi III DPR RI Ichsan Soelistio menjelaskan bahwa



FOTO: BLF/PDI

Anggota Komisi III DPR RI Ichsan Soelistio saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Denpasar, Bali, Jumat (03/05/2024).

sebelumnya Kabaharkam sudah datang ke Bali untuk melakukan peninjauan lapangan. Peninjauan tersebut untuk mengecek persiapan karena dihadiri oleh puluhan negara.

"Jadi ini *event* yang lumayan besar, sehingga nanti memang atensi

dan persiapannya harus dipersiapkan dengan baik. Nanti pihak kepolisian juga akan melakukan koordinasi dengan jajarannya. Jadi memang mereka sudah sangat serius untuk menyiapkan persiapan-persiapan ini, mudah-mudahan akan lancar semuanya," ucap Ichsan Soelistio di sela-sela Kunker Reses Komisi III DPR RI di Denpasar, Bali, Jumat (3/5).

Ichsan berpesan agar pihak kepolisian juga harus memperkuat kerja sama lintas sektoral, dalam hal ini pihak imigrasi, pemda, pemkab dan instansi terkait. Selain itu wilayah Bali juga terdapat struktur masyarakat adat yang juga berperan dalam menjaga keamanan, seperti Pecalang. Maka dari itu, ia berharap semua sektor benar-benar mendapatkan informasi tentang pentingnya agenda forum internasional ini.

blf/rdn

**JADI INI EVENT YANG LUMAYAN BESAR, SEHINGGA NANTI MEMANG ATENSI DAN PERSIAPANNYA HARUS DIPERSIAPKAN DENGAN BAIK. NANTI PIHAK KEPOLISIAN JUGA AKAN MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN JAJARANNYA. JADI MEMANG MEREKA SUDAH SANGAT SERIUS UNTUK MENYIAPKAN PERSIAPAN-PERSIAPAN INI, MUDAH-MUDAHAN AKAN LANCAR SEMUANYA.**

**Ichsan Soelistio**

Anggota Komisi III DPR RI

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya





# Penyimpangan Turis Harus Ditangani Bijaksana



FOTO: BLF/RDT

Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta dalam foto bersama usai mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Denpasar, Bali.

**T**im Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali. Oleh karena itu, menurutnya Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis

yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.

"Karena bagaimanapun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak," ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5).

Selanjutnya, Ia pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan *restorative justice*. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang

berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.

"Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada terlebih mengedepankan *restorative justice* sebagai jalan keluar penanganan kasus," pungkasnya.

Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.

blf/rdn

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya





# Miris! Jumlah Pejudi Online Indonesia Tertinggi di Dunia

**A**nggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan menanggapi maraknya praktik judi *online* di Indonesia. Diketahui, berdasarkan data Drone Emprit, pengguna judi *online* di Indonesia berjumlah 201.122. Angka tersebut menempatkan Indonesia pada posisi puncak pengguna judi *online* di dunia.

“Begini, judi *online* ini merambah ke seluruh dunia. Memang kita yang tertinggi, karena jumlah (penduduk) kita banyak. Tapi yang menjadi kesulitan memberantas judi *online* dibanding judi konvensional adalah *server*, bandar atau pelakunya itu ada di luar negeri. Terutama di Kamboja, Vietnam. Jadi kesulitan aparat penegak hukum kita ini,” ungkap Hinca yang ditemui Parlemenaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (30/4).

Kendati demikian, lanjut Hinca, bukan berarti praktik judi *online* tidak bisa diberantas. Hinca menuturkan, salah satu upaya yang bisa



FOTO: EKI/PDT

Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (30/4/2024).

dilakukan adalah melalui pemblokiran *link* atau domain judi *online* tersebut.

“Boleh kita tutup? Boleh. Kalau saya selalu sarankan kementerian Kominfo agar menutup semua *link-link* (domain) judi *online* itu. Patrolinya harus jelas. Kalau kepolisian kan harus mengejar pada

pelakunya, sehingga ada kesulitan teknis karena berbasis *online* itu,” imbuh Hinca.

Terakhir, Politisi Fraksi Partai Demokrat itu meminta seluruh elemen penegak hukum terus meningkatkan pengetahuannya, sehingga dapat mengatasi secara tuntas praktik judi *online* ini, “Saya kira dunia internasional juga sedang bekerja mengatasi ini,” demikian Hinca.

Anggota Komisi III lainnya Heru Widodo juga turut menanggapi persoalan judi *online* di Indonesia. Menurutnya, persoalan judi *online* merupakan persoalan lama dan klasik. Heru berharap, satuan tugas (Satgas) Pemberantasan Judi *Online* yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) bisa bekerja secara maksimal melalui kerja sama yang baik antar sektor/lembaga yang dilibatkan.

— eki/rdn

**BOLEH KITA TUTUP? BOLEH. KALAU SAYA SELALU SARANKAN KEMENTERIAN KOMINFO AGAR MENUTUP SEMUA *LINK-LINK* (DOMAIN) JUDI *ONLINE* ITU. PATROLINYA HARUS JELAS. KALAU KEPOLISIAN KAN HARUS MENGEJAR PADA PELAKUNYA, SEHINGGA ADA KESULITAN TEKNIS KARENA BERBASIS *ONLINE* ITU.**

## Hinca Pandjaitan

Anggota Komisi III DPR

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Tinjau Kinerja Penanganan Kasus dan Anggaran di Lampung

**T**im Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses guna meninjau kinerja pengawasan penanganan kasus beserta penggunaan anggaran terhadap mitra di Provinsi Lampung. Salah satu yang disoroti Komisi III adalah kasus kekerasan seksual yang terjadi di Lampung Utara.

Kasus berupa pemerkosaan dan penangkapan ini sendiri terjadi pada 14 Februari 2024 di sebuah gubuk di perkebunan yang melibatkan 10 remaja memperkosa NA selama tiga hari berturut-turut dan dipaksa meminum minuman keras (miras). Adapun sejauh ini, Polda Lampung baru berhasil menangkap enam pelaku kekerasan seksual, sedangkan empat penjahat lainnya masih buron.

"Kita juga memberikan atensi terhadap kasus narkoba sindikat internasional yang memang terjadi atau melibatkan beberapa pihak di Lampung ini. Kita harapkan bisa segera diatasi dan untuk hal-hal lainnya juga



Anggota Komisi III DPR RI Rano Al Fath saat mengikuti pertemuan Kunker Reses di Bandar Lampung, Lampung, Senin (19/4/2024).

kita mendorong ya agar penekanan hukum bisa terus dilakukan secara optimal," ujar Anggota Komisi III DPR RI Rano Al Fath di sela-sela pertemuan Kunker Reses di Bandar Lampung, Lampung, Senin (19/4).

Selain itu, Komisi III juga menyoroti kasus eks Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri Gustami yang terlibat sindikat jaringan narkoba internasional, Fredy Pratama. Sebelumnya, polisi berhasil mengamankan sebanyak 39 tersangka jaringan Fredy Pratama pada Selasa (12/9/2023). Dari jumlah tersebut satu di antaranya adalah Andri Gustami.

Sebagai informasi, barang bukti Tindak Pidana Asal (TPA) jaringan Fredy Pratama yang dikumpulkan sejak 2020-2023, aparat penegak hukum telah mengumpulkan narkoba berjenis sabu sebanyak 10,2 ton, ekstasi 116.346 butir, uang tunai Rp4,8 miliar dari 406 rekening, 13 kendaraan dan 4 bangunan.

rdn



**KITA JUGA MEMBERIKAN ATENSI TERHADAP KASUS NARKOTIKA SINDIKAT INTERNASIONAL YANG MEMANG TERJADI ATAU MELIBATKAN BEBERAPA PIHAK DI LAMPUNG INI. KITA HARAPAN BISA SEGERA DIATASI DAN UNTUK HAL-HAL LAINNYA JUGA KITA MENDORONG YA AGAR PENEKANAN HUKUM BISA TERUS DILAKUKAN SECARA OPTIMAL.**

**Rano Al Fath**

Anggota Komisi III DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya





# Penuhi Suplai Industri Pengolahan Ikan

**A**nggota Komisi IV DPR RI Hermanto meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar bisa menciptakan teknologi budidaya ikan yang bisa menghasilkan produk ikan lebih banyak. Sehingga, hal itu bisa terserap di Industri pempek yang merupakan produk olahan pangan, khususnya di Kota Palembang.

Pasalnya, industri pengolahan ikan seperti Pempek yang menjadi salah satu ciri khas Palembang ini masih kekurangan pasokan dua jenis ikan yang sering digunakan, seperti ikan belida dan tenggiri.

“Serta industri (pengolahan ikan) tersebut akan terus berkelanjutan,” ujarnya usai melakukan peninjauan ke Industri Pengolahan Ikan Beringin, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin (29/4).

Lanjut Politisi PKS ini mengatakan olahan pangan dari ikan ini, tidak hanya dikenal di Kota



FOTO: RSB/PDI

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto saat melakukan peninjauan ke Industri Pengolahan Ikan Beringin, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin (29/04/2024).

Palembang saja namun juga di sejumlah daerah. Dengan demikian guna meningkatkan perekonomian, KKP perlu mendukung suplai bahan baku untuk memenuhi produksi

pepek bisa terpenuhi atau ti-dak. Sehingga, kontinuitas dari produksi ini bisa terjamin.

“Kami Komisi IV DPR RI perlu meninjau seberapa jauh stok ikan yang ada di masyarakat bisa diserap industri tersebut. Tentu, jaminannya adalah dengan tersedia stok berkelanjutan maka industri tersebut akan terus berjalan sehingga produk bisa mengalir ke pasaran untuk memenuhi permintaan konsumen, dan perlu ada dukungan dari KKP sebagai penyedia ikan,” pungkasnya.

Di sisi lain, ia menilai industri pengolahan ikan ini dari aspek ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja, yang terbuka buat masyarakat mulai dari lulusan sarjana maupun SMA.

pun/rdn

**KAMI KOMISI IV DPR RI PERLU MENINJAU SEBERAPA JAUH STOK IKAN YANG ADA DI MASYARAKAT BISA DISERAP INDUSTRI TERSEBUT. TENTU, JAMINANNYA ADALAH DENGAN TERSEDIA STOK BERKELANJUTAN MAKA INDUSTRI TERSEBUT AKAN TERUS BERJALAN SEHINGGA PRODUK BISA MENGALIR KE PASARAN UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN KONSUMEN, DAN PERLU ADA DUKUNGAN DARI KKP SEBAGAI PENYEDIA IKAN.**

**Hermanto**

Anggota Komisi IV DPR RI

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Harga Beras Dunia 2024 Tetap Tinggi

- Fenomena Cuaca EL Nino yang telah menyebabkan kekeringan di sebagian besar wilayah Asia membahayakan pasokan beras, gandum, minyak kelapa sawit dan produk lainnya.
- Para pedagang dan pejabat memperkirakan produksi beras Asia pada paruh pertama 2024 akan turun.



## 40-45%

Harga beras naik ke level tertinggi dalam 15 tahun terakhir pada 2023. Harga di beberapa pusat ekspor naik hingga 40%-45%



Curah hujan yang lebih rendah dan menyusutnya waduk akan mengancam hasil panen

Rencana impor beras bukan merupakan langkah antisipatif. Dibandingkan mengusahakan kesejahteraan, pemerintah Indonesia malah akan semakin menjerumuskan para petani Indonesia dalam jurang kemiskinan.

Dibandingkan impor beras, sebaiknya pemerintah Indonesia berupaya berbenah diri. Satu diantaranya adalah mengevaluasi dan memperbaiki sistem logistik nasional.



Anggota Komisi IV DPR  
drh. H. SLAMET

SUMBER: idxchannel.com | berbagai sumber



# Geopolitik Memanas, BUMN Berperan Kuatkan Ekspor

**K**etegangan yang terjadi antara Iran dan Israel yang kian memanas, membuat ekonomi global semakin terpuruk. Hal itu berdampak pula pada pertumbuhan global yang ikut terganggu, tak terkecuali di Indonesia. Terpantau, nilai tukar rupiah terpukul hingga menyentuh angka Rp 16.222 per dolar AS pada Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) per 26 April 2024.

Menanggapi isu tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima pun mengatakan bahwa perlu ada langkah antisipatif untuk menahan efek domino konflik Iran dan Israel. Sehingga, Pemerintah harus cermat menerapkan strategi, salah satunya yaitu melalui diplomasi perdagangan.

“Bicara persoalan krisis ini tidak temporer (atau) jangka pendek, tapi harus dilakukan langkah-langkah opsional. Seperti halnya membuat strategi pemasaran dengan produk



FOTO: HNM/PDT

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Gianyar, Bali, Senin (22/04/2024).

ekspor kita, begitu juga mengamankan hal-hal yang terkait dengan masalah energi dan pangan,” jelas Aria Bima

usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Gianyar, Bali, Senin (22/4).

Menurutnya, imbauan Pemerintah agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membeli dolar demi mengantisipasi pelemahan nilai tukar rupiah dinilai sebagai strategi bersifat sementara. Karena itu, ia menegaskan Pemerintah seharusnya menyusun cara yang lebih matang dan berjangka panjang salah satunya dengan penguatan ekspor.

“Di situlah peran BUMN harus menjadi lebih penting. Harus bisa berperan lebih untuk bisa menopang dan menunjang sektor fundamental. BUMN harus memerankannya untuk kepentingan bangsa,” tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

hnm/rdn



**IMBAUAN PEMERINTAH AGAR BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) MEMBELI DOLAR DEMI MENGANTISIPASI PELEMAHAN NILAI TUKAR RUPIAH DINILAI SEBAGAI STRATEGI BERSIFAT SEMENTARA. KARENA ITU, IA MENEGASKAN PEMERINTAH SEHARUSNYA MENYUSUN CARA YANG LEBIH MATANG DAN BERJANGKA PANJANG SALAH SATUNYA DENGAN PENGUATAN EKSPOR.**

**Aria Bima**

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Dinilai Diskriminatif

**A**nggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menegaskan larangan agar toko kelontong tidak beroperasi 24 jam merupakan bentuk diskriminasi terhadap pelaku usaha kecil. Karena larangan itu akan hanya akan mempersempit ruang gerak dan peluang pelaku usaha warung kecil untuk mengais rezeki.

"Sementara, minimarket milik orang-orang besar dibiarkan buka 24 jam. Sedangkan, warung Madura dipersempit ruang geraknya, ini merupakan tindakan diskriminasi terhadap pengusaha kecil," kata Nasim Khan dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Jumat (26/4).

Dengan demikian, Nasim Khan khawatir, banyak pelaku usaha yang akan gulung tikar dan akhirnya berdampak pada meningkatnya pengangguran. "Kami sampaikan kepada Kementerian Koperasi UMK, jangan terjadi ada peraturan pemerintah maupun Perda di Indonesia,



Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan.

hususnya di tiga kabupaten, yakni Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi yang mengkerdikan atau mematikan usaha pedagang kecil," kata Politisi Fraksi PKB ini,

Seharusnya, sambung Nasim Khan, pemerintah bisa lebih

mengedepankan atau menyediakan iklim usaha yang bersahabat bagi para pelaku usaha kecil ini. Hal tersebut dilakukan agar pelaku UKM bisa berkembang menjadi besar.

"Harusnya pemerintah mendukung toko-toko kelontong Madura yang notabene nya pengusaha kecil, bukan malah dilarang dengan pembatasan jam operasional," tegas wakil rakyat Dapil III Jatim.

Menurutnya, selama ini keberadaan warung-warung Madura yang buka 24 jam telah memberi kontribusi positif dibanyak hal. Seperti membantu kebutuhan masyarakat di malam hari, menjaga keamanan lingkungan, menyerap tenaga kerja, menggerakkan perekonomian rakyat kecil dan melahirkan pengusaha-pengusaha baru. **bia/rdn**

**HARUSNYA PEMERINTAH Mendukung TOKO-TOKO KELONTONG MADURA YANG NOTABENENYA PENGUSAHA KECIL, BUKAN MALAH DILARANG DENGAN PEMBATASAN JAM OPERASIONAL.**

**Nasim Khan** Anggota Komisi VI DPR RI



Scan QR untuk berita selengkapnya



# Hindari Agen Perjalanan Tawarkan Haji Furoda



FOTO: TN/PDT

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VIII DPR RI, di Asrama Haji Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/5/2024).

**W**akil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari agen perjalanan (travel) yang menjanjikan keberangkatan haji dengan menggunakan visa furoda. Menurutnya, haji khusus (visa furoda) tidak bisa dikeluarkan secara mendadak melainkan harus melalui prosedur yang panjang.

“Jelang keberangkatan ibadah haji diimbau kepada masyarakat agar tidak tertipu agen travel yang menjanjikan visa furoda dengan cepat. Pemerintah harus tindak

tegas oknum travel yang dengan jelas merugikan masyarakat,” katanya dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VIII DPR RI, di Asrama Haji Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/5).

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut meminta kepada calon jemaah haji untuk lebih cermat dalam memilih travel keberangkatan ibadah haji. Ia menegaskan pemerintah harus bertindak tegas agen travel yang terbukti merugikan calon jemaah haji dengan janji memberikan visa haji khusus (furoda).

“Keluarga saya juga menjadi korban dengan janji visa furoda ini,

tapi kenyataannya calon jemaah tidak mendapatkan tiket pesawat Jakarta-Saudi melainkan harus transit dulu dan diberangkatkan menuju Riyadh. Setelah dari Riyadh baru menggunakan bus menuju Jeddah,” sebut Marwan.

Diungkapkannya, saat itu korban juga kejar-kejaran dengan pihak imigrasi Saudi yang sebelumnya berangkat menggunakan visa wisatawan bukan untuk haji. “Menggunakan visa wisatawan tidak bisa langsung ke Jeddah melainkan harus melalui Riyadh dulu. Karena jika sampai ketahuan otoritas Saudi bisa langsung dideportasi,” tambahnya. **tn/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya

# Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali

**T**im Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi bersama sejumlah anggota mengapresiasi praktik toleransi dan moderasi beragama yang ada di Bali.

“Bali ini seperti miniatur Indonesia, keberagaman umat beragama nampak eksis di Bali, dan semuanya terasa rukun dan toleran. Kerukunan umat beragama ini merupakan sebuah keberhasilan bagi pemerintah di Provinsi Bali,” ungkap Ashabul Kahfi di Kantor Bappeda, Denpasar, Bali, Kamis (2/5).

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Komang Sri Marheni mengatakan bahwa masyarakat Bali merupakan warga yang hidupnya disokong oleh destinasi wisata. Untuk itu, menurutnya kerukunan antarumat beragama harus dijaga dengan baik.

“Kita tahu bahwa Bali merupakan destinasi wisata yang mana



Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Kantor Bappeda, Denpasar, Bali, Kamis (2/5/2024).

masyarakatnya hidup dari pariwisata. Sudah tentu kami harus tetap menjaga kerukunan umat beragama,” ujar Komang.

Komang menambahkan, untuk menjaga kerukunan umat beragama di Bali, Kementerian Agama selalu bersinergi dan berdialog dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk menjaga program Moderasi Beragama sebagai salah satu program prioritas Kementerian Agama.

“Dengan bersinergi dan berdialog dengan FKUB dan Baznas, juga melalui dialog-dialog baik antarinternal umat beragama, juga para tokoh agama dan tokoh masyarakat tentu kita bisa mencari berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di Bali, serta bersama-sama kita bisa mencari solusi,” ungkap Komang.

eno/rdn



**UNTUK MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI BALI, KEMENTERIAN AGAMA SELALU BERSINERGI DAN BERDIALOG DENGAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) UNTUK MENJAGA PROGRAM MODERASI BERAGAMA SEBAGAI SALAH SATU PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN AGAMA.**

**Ashabul Kahfi**

Ketua Komisi VIII DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya





# Kurikulum Merdeka, UKT, Hingga Kesejahteraan Pengajar Jadi PR Hardiknas Ke-65

**W**akil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti maraknya kegelisahan masyarakat terhadap perubahan sistem pendidikan terkini. Baginya, isu ini harus jadi fokus utama pemerintah karena sektor ini krusial bagi masa depan bangsa.

“Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-65 saat ini harusnya menjadi bahan evaluasi Kemendikbud RI khususnya dalam menyikapi kontroversi yang muncul,” tutur Fikri melalui rilis yang disampaikan kepada **Parlementaria**, di Jakarta, Kamis (2/5).

Salah satu isu yang mencuat adalah soal penerapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum resmi nasional, yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Kurikulum Merdeka diklaim lebih unggul daripada pendahulunya, yakni Kurikulum 2013, dan Kurikulum 2013 yang disempurnakan (2015), kendati Kurikulum Merdeka merupakan



FOTO: OREP/PTI

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.

modifikasi dari kurikulum darurat yang diluncurkan selama pandemi Covid-19 pada tahun ajaran 2020/2021.

“Beberapa pakar menilai, Kurikulum Merdeka belum layak dijadikan kurikulum nasional, karena belum dilengkapi dengan naskah akademik yang memuat

filosofi Pendidikan dan kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran kurikulum merdeka,” imbuh Politisi Fraksi PKS ini.

Sehingga, dirinya melanjutkan bahwa kurikulum merdeka belum teruji secara akademis menjadi solusi atas hilangnya pembelajaran (*learning loss*) selama pandemi Covid-19. “Lalu perlu dievaluasi apakah daerah secara merata mampu dan siap melaksanakan kurikulum baru ini?,” tanyanya.

Kendati demikian, Hasil *Programme for International Student Assessment* (PISA) tahun 2022 diklaim sebagai kesuksesan Kemendikbudristek menerapkan kurikulum darurat selama pandemi covid-19. Peringkat PISA Indonesia tahun 2022 naik 5 hingga 6 peringkat dibanding hasil PISA 2018 lalu.

[um/rdn](#)



**KURIKULUM MERDEKA BELUM TERUJI SECARA AKADEMIS MENJADI SOLUSI ATAS HILANGNYA PEMBELAJARAN (*LEARNING LOSS*) SELAMA PANDEMI COVID-19. “LALU PERLU DIEVALUASI APAKAH DAERAH SECARA MERATA MAMPU DAN SIAP MELAKSANAKAN KURIKULUM BARU INI?”**

**Abdul Fikri Faqih**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Sosialisasi dan Edukasi Dampak Pinjol Harus Masif

**A**nggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng menilai untuk menuntaskan permasalahan pinjaman online (pinjol) tidak hanya dengan aturan yang perlu diperketat. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga perlu melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai dampak dan resiko pinjol. Edukasi ini, tambahnya, juga perlu dimasifkan pada semua media.

“Menurut hemat saya yang harus diperkuat dari OJK adalah sosialisasi. Sosialisasi itu harus lebih banyak masuk ke media-media, media cetak, media TV, media *online*, semua dan secara masif,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar itu saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XI di Semarang, Jawa Tengah, Senin (29/4).

“Jadi masyarakat itu *aware* bahwa memang ini salah satu produk dunia keuangan yang cepat dan



Anggota Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng saat bertukar mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XI di Semarang, Jawa Tengah, Senin (29/04/2024).

praktis, tapi di lain pihak masyarakat juga harus tahu dampak dan resiko dari pinjol itu,” tambahnya.

Menurutnya, masyarakat yang

terjerat pinjol biasanya merupakan orang-orang yang dalam keadaan mendesak membutuhkan uang, di sisi lain pinjol menjanjikan kebutuhan segera mereka itu dengan proses yang mudah. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat juga jika di balik kemudahan proses yang mudah dan cepat itu juga ada risiko dibelakangnya.

“Yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa karena itu pinjaman tanpa jaminan, proses tidak begitu susah, tentunya si pemilik dana ini akan sangat keras dan ketat pada saat penagihannya dan itu berdampak kepada peningkatan jumlah pinjaman. Jadi, mau seketat apapun aturan dibuat tapi kalau masyarakat tidak diberikan edukasi yang memadai *tetep* aja akan terjadi masalah,” jelas Legislator Dapil NTT I itu. [gal/rdn](https://www.gal/rdn)



**YANG PERLU KITA SAMPAIKAN KE-PADA MASYARAKAT BAHWA KARENA ITU PINJAMAN TANPA JAMINAN, PROSES TIDAK BEGITU SUSAH, TENTUNYA SI PEMILIK DANA INI AKAN SANGAT KERAS DAN KETAT PADA SAAT PENAGIHANNYA DAN ITU BERDAMPAK KEPADA PENINGKATAN JUMLAH PINJAMAN. JADI, MAU SEKETAT APAPUN ATURAN DIBUAT TAPI KALAU MASYARAKAT TIDAK DIBERIKAN EDUKASI YANG MEMADAHAI *TETEP* AJA AKAN TERJADI MASALAH,**

**Melchias Markus Mekeng**  
Anggota Komisi XI DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya





# Kurs Rupiah Lemah, Prioritaskan Belanja Negara yang Penting

**N**ilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) akhir-akhir ini kian melemah di level Rp16.200 per USD. Menyoroti hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea mendorong pemerintah dapat menerapkan belanja negara yang punya prioritas penting.

“Tindakan internal kita saat ini harus berhemat. Jadi hindari pembelanjaan (belanja negara) yang tidak penting,” sebutnya ditemui saat kunjungan kerja reses Komisi XI di Surabaya, Jawa Timur, Senin (29/4). Menurutnya, pemerintah harus jeli melihat pos anggaran mana saja yang perlu berhemat.

Legislator Dapil Banten III ini turut mengomentari soal upaya peningkatan daya beli masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu turut serta mengendalikan daya beli agar sinkron dengan strategi penghematan dan penstabilan nilai tukar rupiah terhadap USD.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI)



FOTO: AHAPDOT

Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi XI di Surabaya, Jawa Timur, Senin (29/4/2024).

telah menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 bps menjadi 6,25%. Marinus menilai, upaya menaikkan suku bunga memang tidak mudah. Ia melihat langkah bank sentral itu merupakan upaya jangka pendek dan menengah dalam

menghadapi lonjakan nilai tukar USD.

Selain langkah internal, Marinus turut mendorong pemerintah dapat berpartisipasi mengganggu stabilitas global di forum internasional. “Sebab faktanya, konflik regional seperti di Timur Tengah akhir-akhir ini, lalu Rusia-Ukraina yang terus berlanjut, memang mempengaruhi,” kata Politisi PDI-Perjuangan ini.

Ia mendorong pemerintah dapat menggunakan politik luar negeri dalam mengkampanyekan perdamaian. Sebab kondisi saat ini sebaiknya tidak dibiarkan. “Bukan hanya pemodal dan pengusaha yang terkena dampak. Kurs melemah ada kekhawatiran inflasi tinggi dan ekonomi mengalami pelemahan,” tukasnya. **aha**



**TINDAKAN INTERNAL KITA SAAT INI HARUS BERHEMAT. JADI HINDARI PEMBELANJAAN (BELANJA NEGARA) YANG TIDAK PENTING.**

**Marinus Gea**

Anggota Komisi XI DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Forum Air Sedunia Hadirkan Sumbangsih Pikiran Ilmuwan

**K**etua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menegaskan akan banyak perwakilan dari parlemen negara yang menghadiri Forum Air Sedunia (World Water Forum/WWF) ke-10 di Nusa Dua, Bali pada 18-25 Mei mendatang. Ia pun menekankan sejumlah isu krisis air di dunia yang urgen akan dibahas dalam forum tersebut.

Demikian hal tersebut ia sampaikan saat ditemui oleh **Parlementaria** di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5). Berdasarkan informasi terkini, ada lebih dari 40 negara yang akan menghadiri.

"Forum ini menjadi ruang berkumpulnya sejumlah negara untuk membahas isu air mancanegara.



Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon.

Parlemen juga ikut membahas isu ini. Informasi yang saya terima ada lebih 40 negara yang hadir.

Kami berharap pertemuan ini juga bisa mencegah terjadi kelangkaan air, apalagi saat ini dunia mengalami 'climate change' yang ekstrem," ungkap Fadli Zon.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menyampaikan bahwa pemikiran para ilmuwan terkait isu air dunia akan dibahas bersama dengan para politisi. Upaya ini menjadi salah satu usaha demi menciptakan sebuah resolusi yang bisa menjadi wawasan bagi para pengambil kebijakan untuk membuat regulasi yang *tokcer*.

Sebagai informasi, Forum Air Sedunia ke-10 ini mengusung tema 'Air untuk Kemakmuran Bersama'. Para petinggi negara yang hadir akan membahas 4 (empat) isu air yang krusial. Di antaranya konservasi air, air bersih dan sanitasi, ketahanan pangan dan energi, serta mitigasi bencana alam. [um/rdn](https://www.parlem.id/id/um/rdn)



**FORUM INI MENJADI RUANG BERKUMPULNYA SEJUMLAH NEGARA UNTUK MEMBAHAS ISU AIR MANCANEGERA. PARLEMEN JUGA IKUT MEMBAHAS ISU INI. INFORMASI YANG SAYA TERIMA ADA LEBIH 40 NEGARA YANG HADIR. KAMI BERHARAP PERTEMUAN INI JUGA BISA MENCEGAH TERJADI KELANGKAAN AIR, APALAGI SAAT INI DUNIA MENGALAMI 'CLIMATE CHANGE' YANG EKSTREM.**

**Fadli Zon**

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya





# Parlemen Indonesia-Jepang Tingkatkan Kerja Sama

**K**etua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Jepang Puti Guntur Sukarno menerima Ketua Parlemen Jepang dari Liberal Democratic Party (LDP) Tokai Kisaburo dan Masahiko Shibayama. Dalam pertemuan ini kedua belah pihak membicarakan soal pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi dan pertukaran budaya antara kedua negara. Dalam pembangunan SDM, ia menitikberatkan soal pendidikan, teknologi, penelitian. Pertemuan diselenggarakan di Ruang Delegasi Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (3/5).

“Menitikberatkan kepada pembangunan Sumber Daya Manusia. Baik ini bicara soal pendidikan, kemudian soal beasiswa, pertukaran pelajar maupun pekerja Indonesia - Jepang. Lalu kemudian alih teknologi, kebetulan juga delegasi dari Jepang ini juga bertemu dengan lembaga riset (BRIN), dan juga tadi bicara banyak soal bagaimana alih teknologi dan *research development* untuk Indonesia - Jepang,” papar Puti.



FOTO: OPI/PDI

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Jepang Puti Guntur Sukarno menerima Ketua Parlemen Jepang dari Liberal Democratic Party (LDP) Tokai Kisaburo dan Masahiko Shibayama di Ruang Delegasi Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Menurutnya, kemajuan suatu negara dimulai dari pembangunan SDM yang unggul, bisa melalui pendidikan, penelitian dan pertukaran budaya. “Kita juga bicara bagaimana suatu negara itu bisa menjadi suatu negara yang maju

itu dengan memberikan penekanan dalam pembangunan sumber daya manusianya. Jadi ada lembaga yang memang mengatur hal ini. Dan beberapa universitas ternama di Jepang seperti Keio University, Sophia University, dan University off Tokyo,” ungkap Puti.

Jepang memberikan kesempatan beasiswa untuk para pelajar dan mahasiswa-mahasiswa, untuk mendapatkan pendidikan disana. “Tetapi saya pikir, itu harus bisa diperluas kembali. Tidak hanya di tiga universitas tersebut, tetapi juga bisa diperluas Pemerintah Jepang memberikan kesempatan kepada mahasiswa kita untuk bisa belajar, mengambil ilmu dari Jepang,” harap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

**ssb/rdn**

**KITA JUGA BICARA BAGAIMANA SUATU NEGARA ITU BISA MENJADI SUATU NEGARA YANG MAJU ITU DENGAN MEMBERIKAN PENEKANAN DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIANYA. JADI ADA LEMBAGA YANG MEMANG MENGATUR HAL INI. DAN BEBERAPA UNIVERSITAS TERNA MA DI JEPANG SEPerti KEIO UNIVERSITY, SOPHIA UNIVERSITY, DAN UNIVERSITY OFF TOKYO,**

**Puti Guntur Sukarno**

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Tindak Tegas Pemalsuan Pelat Nomor DPR

**M**ahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyatakan akan melakukan penertiban dan menindak tegas penggunaan pelat nomor palsu. Hal itu disampaikan Wakil Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam bersama dengan Habiburrohman sehubungan dengan banyaknya kasus pemalsuan plat nomor DPR RI yang terjadi beberapa hari belakangan ini.

“MKD akan melakukan penertiban penggunaan pelat palsu. Selama beberapa bulan ini, kami mendapatkan banyak laporan atau informasi dari masyarakat bahwa banyak yang memalsukan plat nomor DPR yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ungkap Nazaruddin dalam konferensi pers yang dilakukan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5).

Jadi pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor DPR RI ini sangat meresahkan bagi masyarakat,



Wakil Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam bersama dengan Habiburrohman dalam konferensi pers yang dilakukan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

sangat merugikan bagi kami DPR,” imbuhnya lagi.

Berdasarkan laporan yang diterimanya per hari ini, terdapat tiga kasus penggunaan pelat nomor

palsu DPR, yakni Mobil Mercy dengan plat 19-III di tol Alam Sutera, mobil Alphard di Depok yang juga kedapatan menggunakan plat DPR bernomor 19, serta kasus seorang Brigadir yang tewas di dalam mobil Alphard di daerah Jakarta Selatan yang juga memasang pelat nomor palsu DPR.

“Nah ini menjadi penting bagi kami untuk menertibkan pemalsuan tersebut. Karena ini sangat merugikan kami selaku anggota DPR dan masyarakat juga menuntut kami untuk menertibkan ini semua. Kami tidak mau dihakimi oleh masyarakat terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini yang telah menggunakan pelat palsu nomor DPR,” jelas Politisi Fraksi PAN ini.

gal/rdn



**MKD AKAN MELAKUKAN PENERTIBAN PENGGUNAAN PELAT PALSU. SELAMA BEBERAPA BULAN INI, KAMI MENDAPATKAN BANYAK LAPORAN ATAU INFORMASI DARI MASYARAKAT BAHWA BANYAK YANG MEMALSUKAN PLAT NOMOR DPR YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM-OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB.**

## Nazaruddin Dek Gam

Wakil Ketua MKD DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya





# Magang di DPR Ajang Momen Uji Publik Renstra 2024-2029

**M**agang di Rumah Rakyat DPR RI Tahun 2024 secara resmi kembali dilaksanakan. Dalam kuliah umum yang secara istimewa dibawakan langsung oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Helmizar, ia membagikan ilmunya tentang Struktur Organisasi, Reformasi Birokrasi dan Rencana Strategis (Renstra) DPR RI 5 tahun kedepan.

Tak hanya itu, Helmizar mengungkapkan bahwa momen kuliah umum yang digelar di hadapan 349 peserta mahasiswa-mahasiswi di Ruang KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5) tersebut juga sekaligus sebagai ajang uji publik Renstra Setjen DPR RI periode 2024-2029 yang tengah disusun oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Setjen DPR RI.

"Ini ada 3 materi Struktur Organisasi, Reformasi Birokrasi dan Renstra DPR RI 5 tahun kedepan, lalu bagaimana proses penyusunan anggaran yang ada di DPR RI maupun yang ada di Setjen DPR RI yang dilakukan oleh Biro Perencanaan Dan Organisasi. Ini adalah uji publik Renstra Setjen DPR RI. Jadi kami



FOTO: MRI/PDT

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Helmizar, usai mengisi kuliah umum di Ruang KK II, Gedung Nusantara DPR RI.

meminta masukan kepada kawan-kawan semua mahasiswa agar Renstra DPR ke depan semakin lebih baik. Jadi ini adalah Renstra 2024-2029," ujar Helmizar.

Helmizar menjelaskan, Renstra DPR RI merupakan salah satu upaya untuk memperkuat lembaga DPR RI dalam menghadirkan *check and balances* di antara 3 cabang kekuasaan, yaitu: eksekutif, legislatif, yudikatif. Renstra DPR RI diinisiasi pertama kali

pada periode 2010-2014 sebagai tindak lanjut desain besar kelembagaan DPR RI.

Sementara itu, Renstra 2025-2029 yang tengah disusun pihaknya merupakan Renstra keempat sebagai tindak lanjut setelah Renstra 2010-2014, 2015-2019 dan 2020-2024 sebagai upaya melanjutkan apa yang belum dapat direalisasikan di periode sebelumnya dan apa yang akan dicapai pada masa yang akan datang. **pun/aha**

SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI  
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

*Jurut Berduka Cita*  
yang sedalam-dalamnya atas wafatnya

**MOH. HAERUL AMRI, SP.**

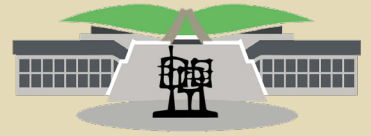
SENIN, 6 MEI 2024  
Anggota Komisi X DPR RI  
No. Anggota: 375  
Fraksi Partai NasDem  
Daerah Pemilihan Jawa Timur II

\*SEMOGA AMAL IBADAHNYA DITERIMA DI SISI-NYA  
DAN DIAMPUNI SEGALA DOSA-DOSANYA

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya







**Komisi IV DPR RI mengunjungi habitat komodo di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (30/4/2024). Taman nasional ini mendapat perhatian dari Komisi IV untuk dapat dijaga sebaik-baiknya.**

FOTO: SKR/AHA

